

# **LAPORAN TENGAH TAHUN**

**LAYANAN PRODUK HASIL  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
GORONTALO**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO  
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2023**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Balai Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Gorontalo merupakan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Tanggal 21 September 2022. Disebutkan bahwa Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Berdasarkan Permentan No. 13 Tahun 2023 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo merupakan UPT yang berada dibawah Balai Besar Penerapan Instrumen Standar Pertanian (BBPSIP) yang memiliki tugas pokok melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, sedangkan fungsinya meliputi: (1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik, (2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (3) Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (4) Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (5) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (6) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi, (7) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, dan (9) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPSIP Gorontalo memiliki sumberdaya manusia sebanyak 42 pegawai ASN terdiri dari 4 fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), 4 fungsional Pengawas Bibit Tanaman (PBT), 1 orang Analis Standardisasi (ASTA), 1 orang Analis Kebijakan (ANJAK), 1 orang Pengawas Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), 8 orang fungsional penyuluh, 6 orang Pengawas Bibit Tanaman Terampil, 2 orang Calon Pranata Komputer dan 15 tenaga administrasi. Tenaga honorer dan tenaga harian lepas sejumlah 21 orang terdiri dari perugas kebersihan, administrasi dan pengemudi. Berdasarkan jenjang pendidikan, BPSIP Gorontalo memiliki 2 orang Doktor (S3), 7 Master (S2), dan 15 Sarjana (S1), 3 orang (D3), serta 15 berpendidikan SLTA ke bawah. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia yang tersedia, beberapa pegawai mengikuti pendidikan tugas belajar S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 2 orang dan DIV sebanyak 2 orang.

BPSIP Gorontalo secara keseluruhan memiliki tanah seluas 5 ha, yang terdiri dari Kantor dan Emplasemen ± 2 ha dan Kebun Percobaan (KP) Tilong Kabila seluas ± 3 ha yang saat ini masih dimanfaatkan dalam kegiatan produksi benih padi. Kebun Percobaan (KP) berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tupoksi serta sebagai wahana untuk menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain tanah, sarana dan prasarana lain yang dimiliki BPSIP Gorontalo adalah bangunan perkantoran dan perpustakaan, rumah dinas 13 unit, mess 1 unit, gudang 4 unit, Lab Diseminasi 1 unit, Lab Tanah dan Tanaman 1 unit serta kendaraan roda-4 dan roda-2 masing-masing sebanyak 3 unit dan 8 unit.

## **II. Layanan Produk Hasil Balai Standardisasi Instrumen Pertanian di Provinsi Gorontalo**

### **2.1 Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan**

#### **Ringkasan**

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian yang salah satunya adalah pembentukan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) maka transformasi eks Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dengan unit kerja (UK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) termasuk di dalamnya adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Gorontalo yang bertransformasi menjadi Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, maka Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo mengemban tugas dalam hal penerapan standar dan diseminasi penerapan standar instrumen di bidang pertanian. Adapun fungsi BPSIP adalah pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi dalam bentuk output rancangan standar instrumen pertanian. Wujud implementasi dari hal tersebut adalah pelaksanaan koordinasi, sosialisasi atau FGD identifikasi hasil standar instrument pertanian spesifik lokasi yang dibutuhkan. Penyusunan rancangan tersebut diharapkan akan bermuara pada tersusunnya SNI yang dapat dijadikan acuan kedepannya dalam menghasilkan produk pertanian. Sehingga, diharapkan berdampak pada hasilkan produk pertanian terstandar yang mendorong kemajuan pertanian disertai peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan produk berdaya saing.

#### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapangan : Penyusunan Rencana Tindak Lanjut pasca Pelaksanaan FGD identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi tanaman pangan yang akan menghasilkan rancangan SNI

Kendala : -  
Solusi : -  
Realisasi fisik : 75 %  
Realisasi keuangan : 58,77 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

### **2.2 Diseminasi Standar Instrumen Pertanian**

#### **Ringkasan**

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Permentan No 13 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang salah satunya adalah pembentukan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Demikian juga dengan unit kerja (UK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) termasuk di dalamnya adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Gorontalo yang bertransformasi menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP Gorontalo). Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, maka Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo mengemban tugas dalam hal penerapan

standar dan diseminasi penerapan standar instrumen di bidang pertanian. Standar instrumen Pertanian tersebut harus dapat tersebar luas kepada para pelaku usaha juga pada para stakeholder lainnya seperti instansi, lembaga dan badan terkait di daerah. Wujud implementasi dari hal tersebut adalah pelaksanaan sosialisasi atau pengenalan dan penyebaran Standar Instrumen Pertanian khususnya SNI bidang pertanian kepada pengguna seperti Poktan, Gapoktan, UMKM, Perusahaan, maupun stakeholder lainnya hingga petani. Harapannya akan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya penggunaan SNI untuk produk, proses atau sistem instrumen pertanian yang selama ini mereka usahakan. Pada akhirnya akan menggugah pelaku usaha untuk menerapkan standar instrumen pertanian yang mereka usahakan. Selain daripada itu, untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap urgensi penerapan SNI, maka akan dilakukan bimbingan teknis penerapan standar instrumen pertanian di tingkat pelaku usaha/UMKM atau Poktan. Melalui bimtek lapang ini harapannya akan semakin terlihat jelas manfaat penerapan SNI.

#### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapang	:	Kegiatan diseminasi telah dilaksanakan 2 kali, yaitu di Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 26 Juli 2023 dan di Kabupaten Gorontalo pada tanggal 27 Juli 2023
Kendala	:	-
Solusi	:	-
Realisasi fisik	:	90 %
Realisasi keuangan	:	70,71 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

### **2.3 Taman Agrostandar**

#### **Ringkasan**

Taman Agrostandar merupakan satu hamparan yang kompak dan strategis di sekitar Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Gorontalo yang berfungsi sebagai display beragam komoditas hortikultura yang dibudidayakan sesuai dengan Good Agriculture Practices yang dapat dikunjungi, sekaligus sebagai media diseminasi dan media pembelajaran. Dengan pengertian seperti di atas, maka Taman Agrostandar merupakan pengembangan dari program yang telah ada dan dibangun oleh UK/UPT, serta sebagai integrasi berbagai program yang ada, terutama yang terkait dengan diseminasi instrumen pertanian yang terstandardisasi. Taman agrostandar berlokasi di lahan perkantoran dengan terdiri dari: Kebun Bibit Induk (KBI) dan Pemanfaatan Lahan Perkantoran. Ruang lingkup GAP sayuran meliputi: Manajemen Usaha Produksi, Lahan dan Media Tanam, Benih, Penanaman, Pemeliharaan, Pemupukan, Perlindungan Tanaman, Irigasi/Fertigasi, Panen, Pasca Panen. Manajemen usaha produksi meliputi: pencatatan dan dokumentasi, evaluasi internal, penanganan kemampuan pelaku usaha dan penanganan keluhan. Pencatatan usaha dalam GAP merupakan hal yang diwajibkan.

#### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapang	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- penataan screen house dengan penanaman melon hidroponik dan melon dalam polybag varietas Madesta</li><li>- penanaman kangkung, pare, tomat dan terong di lahan dan polybag</li><li>- perakitan irigasi tetes</li><li>- penggantian pompa air</li></ul>
----------------------------	---	--

		- panen bunga kol, selada dan pakcoy
		- pemeliharaan tanaman
Kendala	:	- serangan OPT pada tanaman muda
		- irigasi tetes kurang berfungsi baik karena tersumbat
		- pompa pada hidroponik tidak berfungsi
Solusi	:	- pengendalian OPT secara intensif
		- membersihkan saluran irigasi tetes
		- mengganti pompa yang tidak berfungsi
Realisasi fisik	:	55 %
Realisasi keuangan	:	53,45 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## **2.4 Penyusunan Materi penyuluhan Standardisasi Instrumen Pertanian Ringkasan**

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Permentan No 13 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang salah satunya adalah pembentukan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) maka transformasi eks Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dengan unit kerja (UK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) termasuk di dalamnya adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Gorontalo yang bertransformasi menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP Gorontalo). Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, maka Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo mengemban tugas dalam hal penerapan standar dan diseminasi penerapan standar instrumen di bidang pertanian. Standar instrumen Pertanian tersebut harus dapat tersebar luas kepada para pelaku usaha juga pada para stakeholder lainnya seperti instansi, lembaga dan badan terkait di daerah. Wujud implementasi dari hal tersebut adalah dengan penyebarluasan materi penyuluhan tercetak Standar Instrumen Pertanian khususnya SNI bidang pertanian kepada pengguna seperti Poktan, Gapoktan, UMKM, Perusahaan, maupun stakeholder lainnya hingga petani. Harapannya akan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya penggunaan SNI untuk produk, proses atau sistem instrumen pertanian yang selama ini mereka usahakan. Pada akhirnya akan menggugah pelaku usaha untuk menerapkan standar instrumen pertanian yang mereka usahakan.

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapang	:	Proses penyusunan Leaflet, X- Banner, Poster dan Buku sudah jadi draft Xbanner SNI ayam KUB dan SNI VUB Padi
Kendala	:	proses penyusunan draft materi penyuluhan oleh penyusun, masih ada draft materi yang belum representatif
Solusi	:	mengingatkan secara konsisten kepada para penyusun untuk menyelesaikan target, koreksi lagi oleh atasan dan reviewer
Realisasi fisik	:	30 %
Realisasi keuangan	:	28,64 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## **2.5 Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Spesifik Lokasi**

### **Ringkasan**

Salah satu misi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pembangunan pertanian Indonesia adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian (Renstra Kementan 2020-2024). Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian. Peningkatan daya saing produk-produk pertanian dapat dilakukan melalui penerapan teknologi dan penerapan standar instrumen pertanian. Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Dengan produk-produk pertanian yang terstandar dan tersertifikasi maka akan meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan. Oleh karena itu kegiatan standardisasi pertanian menjadi penting karena juga berfungsi dalam meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Di Indonesia, kegiatan standardisasi selama ini dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). BSN sendiri merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Kegiatan standardisasi selain dilaksanakan oleh BSN juga dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (KL) teknis terkait. Untuk bidang pertanian, saat ini kegiatan standardisasi juga dilaksanakan dan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pertanian melalui Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang baru dibentuk pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022. BSIP ini merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. BSIP memiliki tugas utama untuk merumuskan dan mengkoordinasikan standar instrumen pertanian, serta untuk mengharmonisasikan penerapan dan pemeliharaan standar instrumen pertanian. BSIP juga memiliki peran untuk mendesain proses bisnis pengembangan benih/bibit dari hulu hingga hilir yang dapat menjamin ketersediaan benih/bibit secara terus menerus dengan jumlah yang cukup, sesuai dengan musim tanam, yang merupakan kunci utama pengembangan dan peningkatan provitas hasil pertanian.

Selain tugas utama dalam merumuskan, menetapkan dan mengembangkan standar instrumen pertanian, BSIP juga memiliki tugas utama dalam penerapan standar instrumen pertanian kepada pelaku usaha yang dalam hal ini bisa petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau lembaga agribisnis/UMKM. Dalam menjalankan tugas penerapan standar instrument pertanian ini, BSIP dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah yaitu Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) yang ada di 33 Provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. BPSIP resmi menjadi UPT baru pengganti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023. BPSIP memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi sesuai keunggulan daerah masing-masing. BPSIP Gorontalo akan melaksanakan kegiatan perdana pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian mulai tahun 2023 ini sesuai komoditas unggulan berorientasi ekspor di Provinsi Gorontalo. Dengan terbentuknya Balai

Penerapan Standar ini diharapkan mampu meningkatkan dan mengakselerasi penerapan standar instrument pertanian bagi pelaku utama dan pelaku usaha sehingga mampu meningkatkan komoditas ekspor dan daya saing produk-produk pertanian Indonesia serta mampu bersaing ditingkat global dalam perdagangan internasional.

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

- Capaian kegiatan di lapang : Sampai bulan Juli 2023 ini, progres kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Pelaksanaan Gap Analysis, pengujian sampel awal, pendampingan Penyusunan dokumen mutu SNI ISO 9001:2015, penyusunan SOP/Diagram alir proses produksi, perbaikan area produksi, dan pendaftaran merek dagang pupuk organik padat, perancangan aplikasi sistem manajemen mutu lembaga penerap SNI berbasis web/digital, penyiapan dokumen permohonan sertifikasi SNI ke LS Pro (ICP Elaborasi Surabaya).
- Kendala : Proses pengujian sampel awal relatif lama, sampai saat ini belum ada hasil pengujian komposisi parameter pupuk organik padat eksisting
- Solusi : Koordinasi dengan laboratorium pengujian di BSIP Sulawesi Selatan
- Realisasi fisik : 50 %
- Realisasi keuangan : 33,47 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## **2.6 Laboratorium Terstandar**

### **Ringkasan**

Pengelolaan laboratorium adalah kegiatan merancang kegiatan, mengoperasikan, memelihara dan merawat peralatan dan bahan, fasilitas dan atau segala obyek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu sehingga mencapai hasil yang optimal. Pengelolaan laboratorium meliputi : (1) Perancangan kegiatan laboratorium, (2) Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, (3) Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, (4) Pengevaluasian sistem kerja Laboratorium, (5) Pengembangan kegiatan Laboratorium, (6) Penguatan SDM pengelola. Manajemen Laboratorium dalam hal ini manajemen mutu, harus didesain untuk selalu memperbaiki efektifitas dan efisiensi kerjanya, disamping itu harus mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Berdasarkan standar mutu laboratorium ISO 17025, maka terdapat beberapa struktur penting dalam pengelolaan laboratorium terstandar meliputi : (1) manajer puncak, (2) manajer mutu, (3) manajer teknis, (4) manajer administrasi, (5) penyelia, dan (6) analis atau operator. Mengacu pada standar tersebut pengelolaan laboratorium terstandar perlu didukung dengan tenaga laboran atau SDM yang profesional. Karena itu, tenaga laboratorium sebagai salah satu komponen yang dominan terhadap perkembangan dan bahkan kemunduran suatu laboratorium. Tenaga laboratorium terstandar merupakan salah satu tenaga profesional yang sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan mutu hasil pertanian melalui kegiatan pengelolaan laboratorium pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Sehingga tenaga profesional laboratorium perlu di sertifikasi guna untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan laboratorium sebagai penguji mutu yang handal.

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapang	:	Telah dilakukan penerimaan barang oleh tim PPHP dan telah dilakukan pembayaran 100%
Kendala	:	Tidak ada kendala
Solusi	:	-
Realisasi fisik	:	100 %
Realisasi keuangan	:	100 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## **2.7 Produksi Benih Jagung Komposit Terstandar**

### **Ringkasan**

Untuk mendukung program swasembada pangan, perlu penyediaan benih yang memiliki kualitas yang baik. Penyiapan benih yang dilakukan di kawasan pengembangan memiliki keuntungan seperti tepat jumlah, tepat waktu, tepat varietas, dan mutu benih masih tergolong baik karena diproduksi di wilayah tersebut. Benih merupakan input utama dalam produksi pertanian. Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul akan menghasilkan tanaman yang produktif dan lebih efisien. Nirhono (2009) menyatakan bahwa 60% tingkat keberhasilan usahatani ditentukan oleh penggunaan benih yang bermutu. Kebutuhan benih bersertifikat semakin meningkat sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan benih bermutu, namun ketersediaan benih bermutu masih terbatas. Untuk itu kegiatan pengembangan produksi benih jagung hibrida perlu dilakukan agar kendala yang dihadapi petani jagung khususnya harga benih yang relatif mahal dapat teratasi. Untuk itu tujuan dari Kegiatan Dukungan Perbenihan Komoditas Program Strategis Kementan (Produksi Benih Sumber Jagung Terstandar)

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapang	:	Penambahan lokasi baru seluas 1,2 ha dan telah dilakukan penanaman dan pemupukan II. Di lokasi yang lain kegiatan yang berlangsung adalah pemupukan II, rouging I dan II , aplikasi ZPT, pengendalian OPT dan gulma
Kendala	:	Adanya serangan hama ulat grayak Frugiperda (UGF) atau Fall Armyworm (FAW)
Solusi	:	Pengendalian hama telah dilakukan melalui penyemprotan insektisida yang berbahan aktif emamektin benzoat
Realisasi fisik	:	32 %
Realisasi keuangan	:	31,41 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## **2.8 Produksi Benih Sumber Padi Unggul Spesifik Lokasi Terstandar**

### **Ringkasan**

Untuk mendukung program swasembada padi, perlu penyediaan benih yang memiliki kualitas yang baik. Penyiapan benih yang dilakukan di kawasan pengembangan memiliki keuntungan seperti tepat jumlah, tepat waktu, tepat varietas, dan mutu benih masih tergolong baik karena diproduksi di wilayah tersebut. Benih merupakan input utama dalam produksi pertanian. Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul akan menghasilkan tanaman yang produktif

dan lebih efisien. Nirhono (2009) menyatakan bahwa 60% tingkat keberhasilan usahatani ditentukan oleh penggunaan benih yang bermutu. Kebutuhan benih bersertifikat semakin meningkat sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan benih bermutu, namun ketersediaan benih bermutu masih terbatas. Untuk itu kegiatan pengembangan produksi benih padi perlu dilakukan agar kendala yang dihadapi petani padi khususnya harga benih yang relatif mahal dapat teratasi. Untuk itu tujuan dari Kegiatan Dukungan Perbenihan Komoditas Program Strategis Kementan (Produksi Benih Sumber Padi Terstandar)

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapang	:	Panen dan prosesing benih pertanaman tahap I varietas Padjajaran dan Nutrizinc
Kendala	:	-
Solusi	:	-
Realisasi fisik	:	50 %
Realisasi keuangan	:	74,06 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## **2.9 Bimbingan Teknis Perbenihan Jagung dan Padi Terstandar**

### **Ringkasan**

Untuk mendukung program swasembada pangan, perlu penyediaan benih yang memiliki kualitas yang baik. Penyiapan benih yang dilakukan di kawasan pengembangan memiliki keuntungan seperti tepat jumlah, tepat waktu, tepat varietas, dan mutu benih masih tergolong baik karena diproduksi di wilayah tersebut. Benih merupakan input utama dalam produksi pertanian. Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul akan menghasilkan tanaman yang produktif dan lebih efisien. Nirhono (2009) menyatakan bahwa 60% tingkat keberhasilan usahatani ditentukan oleh penggunaan benih yang bermutu. Kebutuhan benih bersertifikat semakin meningkat sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan benih bermutu, namun ketersediaan benih bermutu masih terbatas. Peningkatan kapasitas pelaku kegiatan perbenihan tanaman merupakan salah satu hal yang krusial dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan sehingga kegiatan Bimbingan Teknis Perbenihan Jagung dan Padi Terstandar perlu dilakukan agar kendala yang dihadapi petani dalam peningkatan provitas kegiatan perbenihan dapat teratasi.

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapang	:	1. Entri data kuisioner pre dan post test guna mengetahui dampak perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta bimtek perbenihan terstandar 2. Analisis data dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS 3. Interpretasi hasil evaluasi pre dan post test pelaksanaan bimtek terstandar, bahwa berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa bimtek perbenihan dapat memberikan peningkatan pengetahuan peserta bimtek, dimana dari uji statistic bahwa nilai rata-rata score peserta meningkat dari 4,2 menjadi 4,8. Nilai ini walaupun relative meningkat namun perlu terus ditingkatkan sehingga petani benar-benar paham terhadap budidaya benih terstandar
Kendala	:	Beberapa peserta tidak mengisi kuisioner

Solusi : Mengeliminasi kuisioner yang tidak diisi oleh peserta  
 Realisasi fisik : 70 %  
 Realisasi keuangan : 60,06 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

Pada bulan Juli 2023, terlampir stok benih di UPBS BPSIP Gorontalo.

No	Nama UK/UPT	Produksi (kg)			Distribusi (kg)			Stok (kg)		
		FS	SS	ES	FS	SS	ES	FS	SS	ES
	<b>BSIP Gorontalo</b>	<b>2,044</b>	<b>0</b>	<b>1,126</b>	<b>1,073</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>1,071</b>
1	Jakarin	4,011			3,021			990		
2	JH 37			1,126			876			250

No	Nama UK/UPT	Produksi (kg)			Distribusi (kg)			Stok (kg)		
		FS	SS	ES	FS	SS	ES	FS	SS	ES
	<b>BSIP Gorontalo</b>	<b>310</b>	<b>2,395</b>	<b>3,045</b>	<b>185</b>	<b>2,395</b>	<b>3,045</b>	<b>125</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
1	Inpari 41		30			30		0	0	0
2	Cakrabuana Agritan	20	20	885	20	20	885	0	0	0
3	Bioni 63 Ciherang Agritan		75	2,100		75	2,100	0	0	0
4	Inpari Ir Nutrizinc		30	60		30	60	0	0	0
5	Inpago 13 Fortiz	290			290			0	0	0
6	Situbagendit		630			630		0	0	0
7	Padjajaran Agritan		1,610			1,610		0	0	0
8	Padjajaran Agritan		1,440			450		0	990	0
9	Inpari 37 Lanrang		917			917		0	0	0

Sumber data : UPBS BPSIP Gorontalo Juli 2023

## 2.10 Layanan BMN Ringkasan

Dalam rangka optimalisasi tata kelola keuangan dan aset/ Barang Milik Negara, BPSIP Gorontalo terus melakukan perbaikan sistem akuntansi. Lebih dari itu, BPSIP Gorontalo bahkan terus melakukan pembimbingan dan pembinaan dalam hal manajemen akuntansi kepada pemerintah daerah, terutama dalam hal tata kelola keuangan dan aset/Barang Milik Negara yang berasal dari dana yang bersumber dari anggaran kementerian Pertanian.

BMN merupakan bagian dari aset milik pemerintah pusat, sehingga harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 788//Kpts/PL.310/11/2017 tentang pendelegasian sebagian kewenangan Menteri Pertanian selaku pengguna barang kepada pejabat eselon I dan kepala satuan kerja selaku kuasa pengguna barang bidang pengelolaan barang milik negara di lingkungan kementerian pertanian.

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapang : - Mendata kembali daftar barang per ruangan berdasarkan NUP, Kode Barang, dan tahun perolehan  
- Melakukan pengimputan Barang Milik Negara di aplikasi SAKTI sampai bulan Juni  
- Mengikuti kegiatan work shop verifikasi dan reuiu laporan BMN semester I

Kendala : -

Solusi : -

Realisasi fisik : 65 %

Realisasi keuangan : 62,68 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## **2.11 Pengelolaan Instalasi Kebun Tilong Kabila**

### **Ringkasan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 93/KPTS/KB.410/M/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, Tentang optimalisasi kebun percobaan pada unit pelaksana teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, maka sejak ditetapkannya keputusan ini, kebun percobaan (KP) telah menjadi Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian atau disingkat menjadi IP2TP. Namun seiring dengan terbitnya Perpres No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Tanggal 21 September 2022 dan Permentan No. 13 Tahun 2023 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian maka IP2TP beralih nama menjadi Instalasi Kebun dengan peran sebagai lokasi diseminasi inovasi pertanian pada unit pelaksana teknis. Instalasi Kebun mempunyai karakteristik sebagai lokasi : a. Kebun koleksi sumberdaya genetik pertanian; b. Penghasil sumber benih; c. Diseminasi/show windows teknologi; d. Kebun produksi; e. Agrowisata; f. Uji multilokasi galur harapan/atau g. Bimbingan teknis inovasi pertanian.

Instalasi kebun Tilongkabila meliputi usaha perbenihan padi VUB di lahan IP2TP Tilongkabila seluas 3 Ha. Kebun Percobaan (KP) berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tupoksi serta sebagai wahana untuk menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapang : Panen Musim I telah dilaksanakan

Kendala	:	Serangan hama penggerek batang dan walang sangit yang masif sehingga malai kering dan bulir tidak berisi
Solusi	:	Penyemprotan dengan pestisida sampai akhir fase generatif
Realisasi fisik	:	71 %
Realisasi keuangan	:	70,50 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## **2.12 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Ketatausahaan**

### **Ringkasan**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo merupakan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Tanggal 21 September 2022 dan Permentan No. 13 Tahun 2023 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Disebutkan bahwa Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam upaya mencapai visi tersebut, penyelenggaraan manajemen perkantoran merupakan hal yang tidak kalah penting dilaksanakan guna mendukung output kinerja Balai. Selain daripada itu, tentunya perlu ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas dan kinerja Balai.

Kegiatan penyelenggaraan layanan perkantoran merupakan pelaksanaan dari fungsi urusan tata usaha dan rumah tangga balai yang mendukung pelaksanaan tugas balai sebagaimana disebutkan dalam Permentan nomor 16/2006. Dalam implementasinya, kegiatan penyelenggaraan perkantoran dilakukan dalam bentuk : pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan perkantoran. Untuk mendukung peningkatan kinerja ASN BSIP Gorontalo di lakukan melalui pembayaran gaji dan non gaji terbayarnya gaji sesuai dengan hak pegawai ( jabatan, pangkat/golongan ruang, masa kerja) secara tepat waktu sehingga terlaksananya tugas atau tanggungjawab pegawai secara peorangan sehingga tujuan balai tercapai.

Untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran terdiri dari (1). Keperluan sehari – hari perkantoran (2) pembayaran langganan daya dan jasa, (3) Pemeliharaan Perkantoran (Gedung, Bangunan serta Peralatan dan Mesin), (4) Pembayaran terkait pelaksanaan operasional satuan kerja. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapang	:	- Pengusulan Tukin pegawai untuk bulan Juli 2023 - Penginputan absen Juli 2023 - Memproses pembayaran gaji pegawai bulan Juli - Ujian kenaikan pangkat a.n Nurhayun Kobi
Kendala	:	-
Solusi	:	-
Realisasi fisik	:	45 %
Realisasi keuangan	:	38,10 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## **2.13 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Implementasi ISO 9001:2015**

### **Ringkasan**

Balai Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Gorontalo merupakan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Tanggal 21 September 2022. Disebutkan bahwa Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam upaya mencapai visi tersebut, penyelenggaraan manajemen perkantoran merupakan hal yang tidak kalah penting dilaksanakan guna mendukung output kinerja Balai. Selain daripada itu, tentunya perlu ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas dan kinerja Balai.

Untuk menciptakan sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi diperlukan peningkatan mutu Profesionalisme, sikap pengabdian dan pengembangan PNS melalui pendidikan dan pelatihan maupun non pendidikan dan pelatihan. Pada bidang keuangan belum dilakukannya secara optimal, sehingga perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur dan akuntabel. Selain itu pengelolaan sarana dan prasarana belum dilakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengadministrasiannya secara tertib sehingga diperlukan ketersediaan anggaran yang cukup untuk pengelolaan ketiga aspek kegiatan tersebut.

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapangan	: Pelaksanaan RTM, pembahasan draft Doksistu ISO 9001:2015 BSIP Gorontalo, isu internal dan eksternal serta matriks harapan dan penyusunan SOP
Kendala	: Penyusunan SOP memerlukan waktu lebih lama
Solusi	: Dilaksanakan penyusunan per divisi
Realisasi fisik	: 40 %
Realisasi keuangan	: 7,23 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## **2.14 Pengelolaan Perpustakaan**

### **Ringkasan**

Perpustakaan adalah unit yang sangat diperlukan dalam sebuah institusi penelitian dan pengkajian. Fungsinya adalah mendokumentasikan data informasi pertanian dan hasil-hasil pengkajian, menyediakan berbagai informasi ilmiah bagi penggunanya, serta menyebarkan berbagai inovasi pertanian yang telah dihasilkan BSIP Gorontalo. Hal ini bertujuan untuk mendokumentasikan semua data informasi pertanian dan hasil-hasil pengkajian serta menyebarkannya dan memudahkan pengguna dalam mengakses informasi pertanian maupun hasil pengkajian. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi Pelayanan pengunjung, perawatan/pemeliharaan, penyebarluasan publikasi hasil pengkajian, mendukung mobile library, penyusunan database informasi pertanian dan hasil-hasil pengkajian, alih media data dan informasi secara digital (Data Base Bahan Pustaka dengan sistem OPAC), penambahan koleksi dan peningkatan SDM.

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapang	:	Pelaksanaan sirkulasi bulanan
Kendala	:	-
Solusi	:	-
Realisasi fisik	:	50 %
Realisasi keuangan	:	25,28 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## 2.15 Website, Database dan Sistem Informasi Manajemen

### Ringkasan

Website merupakan wadah untuk melakukan penyebaran informasi melalui jaringan internet sehingga segala informasi yang ada didalamnya dapat diakses oleh pengguna darimanapun dan kapanpun. Website juga merupakan unit yang sangat diperlukan dalam sebuah Lembaga Penelitian terutama dalam rangka peningkatan pelayanan diseminasi teknologi pertanian. Dengan adanya Website maka pengguna baik stake holders, penyuluh, peneliti bahkan petani sekalipun dapat dengan mudah mendapatkan informasi ilmiah selama mereka secara rutinitas bergelut dengan pertanian. Begitu pentingnya website bagi sebuah Perguruan Tinggi, sehingga banyak hal yang dilakukan untuk mengembangkannya; diantaranya adalah dengan adanya kontribusi perkembangan ICT (*Information and Communcation Technology*), hal ini makin memudahkan para pengelola dalam menyajikan informasi pada pengguna begitu pula sebaliknya pengguna makin mudah dalam mengakses informasi yang ada di BPSIP Gorontalo dengan cepat dan tepat dimanapun pengguna Website berada.

Melalui media website, database dan perpustakaan segala informasi hasil penelitian dan pengkajian teknologi pertanian dapat diakses oleh pengguna dengan mudah. Sebagai pusat informasi media website saat ini juga harus memberikan layanan yang aman dan lengkap bagi penggunanya. Selain kelengkapan informasi, koleksi, dua hal yang harus diperhatikan adalah pelayanan dan ragam informasi yang diberikan sangat dituntut oleh pengguna.

### Hasil Monitoring Evaluasi

Capaian kegiatan di lapang	:	Membuat Membuat 56 Posting Media Sosial dengan jumlah masing-masing Facebook berjumlah 23 Post dan Instagram berjumlah 23 Post
Kendala	:	Masih menunggu aktivasi domain gorontalo.bsip.pertanian.go.id
Solusi	:	Membuat berita menggunakan media sosial Hosting sistem informasi menggunakan domain beli sendiri
Realisasi fisik	:	61 %
Realisasi keuangan	:	60,85 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## 2.16 Pengelolaan PPID

### Ringkasan

BPSIP Gorontalo menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh badan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih (Good Governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Pemenuhan hak dasar untuk memperoleh informasi selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). selanjutnya pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keterbukaan informasi publik, kementerian pertanian mengimplementasikan UU KIP tersebut dengan membuat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/201 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/ OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

- Capaian kegiatan di lapangan : - Melaksanakan rapat progress kegiatan PPID bulan Juli terkait pelaksanaan public hearing Standar Pelayanan Publik BSIP Gorontalo,  
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemda Dinas Kominfotik Prov. Gorontalo terkait dalam penyediaan media informasi Videotron sebagai sosialisasi Pelayanan Publik BSIP Gorontalo
- Kendala : Dalam pelaksanaan sosialisasi SPP telah dilaksanakan public Hearing bersama pemda setempat pada tanggal 26 Mei 2023, namun dengan adanya surat dengan nomor : B.2446/OT.240/H.12/06/2023 menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan public hearing diharapkan menghadirkan Biro OK dan Sekretariat BSIP. Sehingga BSIP Gorontalo belum melaksanakan kembali dikarenakan keterbatasan anggaran.
- Solusi : Untuk itu dengan melakukan koordinasi dengan Balai Besar Penerapan terkait pelaksanaan public Hearing SPP ini agar dapat dimudahkan melalui fasilitas zoom meeting
- Realisasi fisik : 45 %  
Realisasi keuangan : 30,86 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

Pada bulan Juli 2023 dilakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di BPSIP Gorontalo, terdapat 12 responden yang mengisi kuisioner dan responden bersifat heterogen. Hasil analisis menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat di BPSIP Gorontalo memiliki nilai interval konversi IPK sebesar 93,73 atau sama dengan mutu pelayanan B yang berarti Baik. Terlampir hasil analisis Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di BPSIP Gorontalo adalah sebagai berikut.

PENGOLAHAN DATA IKM

PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK  
ALAMAT  
TELEP/FAX  
EMAIL

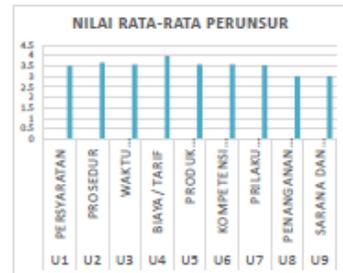
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO/LUMUM  
Jalan Moh Van Gobel No.270, Ilohaluma, Tilongkabila, Bone Bolango, Gorontalo  
(0435) 827627  
www.esmrbalo.tlbacg.pertanian.go.id

BULAN	RESPONDEN 1	U1 2	U2 3	U3 4	U4 5	U5 6	U6 7	U7 8	U8 9	U9 10	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	USIA	PENDIDIKAN	KEPERLUAN
JUNI	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	L	PNS	49	S2	Moner Mahasiswa Magang
	2	4	3	3	3	3	3	4	4	3	P	Pelajar/Mahasiswa	23	SMU	Menjemput Sertifikat Magang Mahasiswa
	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	P	PNS	42	S2	Menjemput Nilai Prakerin siswa SMK
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	L	PNS	37	S2	Monitoring
	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	P	PNS	39	s1	Monitoring Prakerin
	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	L	Pelajar/Mahasiswa	20	SMU	Mengantar Surat Permohonan Penyetoran
	7	3	4	3	4	3	4	3	4	3	P	Pelajar/Mahasiswa	22	SMA	Pengujian Pupuk Cair
	8	4	4	4	3	4	4	4	4	4	L	Lainya	45	S1	Membeli Benih jagung
	9	3	4	3	4	3	4	3	4	3	P	Pelajar/Mahasiswa	22	SMA	Pengujian Pupuk Cair
	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	L	Pelajar/Mahasiswa	26	SMA	Pengujian Pupuk Cair
	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	L	PNS	46	S1	Moner Sertifikasi
	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	L	Pegawai Swasta	26	S1	Survey internet
TOTAL		45	47	44	46	44	46	45	48	44					
NRR PER UNSUR/ JMLH NILAI PERUNSUR/ JUMLAH		3,75	3,92	3,67	3,83	3,67	3,83	3,75	4,00	3,67					
NRR TERTIMBANG PERUNSUR =		0,41	0,43	0,40	0,42	0,40	0,42	0,41	0,44	0,40					
NRR PERUNSUR X 0,071 =		29,29	30,59	28,64	29,94	28,64	29,94	29,29	31,24	28,64					
NILAI INDEKS		3,75													
IKM UNIT PELAYANAN		93,73													
MUTU PELAYANAN		A													
KINERJA		SANGAT BAIK													

KETERANGAN  
U1-U9 = UNSUR-UNSUR PELAYANAN  
NRR = NILAI RATA-RATA  
IKM = INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
\*) = JUMLAH NRR TERTIMBANG  
)\*) = JUMLAH NRR TERTIMBANG/25  
NRR PERUNSUR = JUMLAH NRR TERTIMBANG/JUMLAH  
NRR TERTIMBANG = NRR PERUNSUR X 0,111 PERUNSUR

IKM UNIT PELAYANAN  
MUTU PELAYANAN  
A (SANGAT BAIK) 88,31-100,0  
B (BAIK) 76,61-88,30  
C (KURANG BAIK) 65,00-76,60  
D (TIDAK BAIK) 25,00-64,99

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	PERSYARATAN	3,75
U2	PROSEDUR	3,92
U3	WAKTU PELAYANAN	3,67
U4	BIAYA/ TARIF	3,83
U5	PRODUK LAYANAN	3,67
U6	KOMPETENSI PELAKSANA	3,83
U7	PILAKU PELAKSANA	3,75
U8	PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUK	4,00
U9	SARANA DAN PRASARANA	3,67



Sumber data : Kerjasama BPSIP Gorontalo Juli 2023

2.17 Gaji dan Tunjangan Ringkasan

Kegiatan penyelenggaraan layanan perkantoran merupakan pelaksanaan dari fungsi urusan tata usaha dan rumah tangga balai yang mendukung pelaksanaan tugas balai sebagaimana disebutkan dalam Permentan nomor 16/2006. Dalam implementasinya, kegiatan penyelenggaraan perkantoran perkantoran dilakukan dalam bentuk : pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan perkantoran. Untuk mendukung peningkatan kinerja ASN BPSIP Gorontalo di lakukan melalui pembayaran gaji dan non gaji terbayarnya gaji sesuai dengan hak pegawai ( jabatan, pangkat/golongan ruang, masa kerja) secara tepat waktu sehingga terlaksananya tugas atau tanggungjawab pegawai secara peorangan sehingga tujuan balai tercapai.

Untuk mendukung peningkatan kinerja ASN BPSIP Gorontalo di lakukan melalui pembayaran gaji dan non gaji terbayarnya gaji sesuai dengan hak pegawai ( jabatan, pangkat/golongan ruang, masa kerja) secara tepat waktu sehingga terlaksananya tugas atau tanggungjawab pegawai secara peorangan sehingga tujuan balai tercapai.

Hasil Monitoring Evaluasi

Capaian kegiatan di : Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN BPSIP lapang Gorontalo periode Juli 2023

Kendala : -

Solusi : -

Realisasi fisik : 47,53 %  
Realisasi keuangan : 47,53 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## **2.18 Operasional dan Pemeliharaan Kantor**

### **Ringkasan**

Kegiatan penyelenggaraan layanan perkantoran merupakan pelaksanaan dari fungsi urusan tata usaha dan rumah tangga balai yang mendukung pelaksanaan tugas balai sebagaimana disebutkan dalam Permentan nomor 16/2006. Dalam implementasinya, kegiatan penyelenggaraan perkantoran dilakukan dalam bentuk : pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan perkantoran. Untuk mendukung peningkatan kinerja ASN BPSIP Gorontalo dilakukan melalui pembayaran gaji dan non gaji terbayarnya gaji sesuai dengan hak pegawai ( jabatan, pangkat/golongan ruang, masa kerja) secara tepat waktu sehingga terlaksananya tugas atau tanggungjawab pegawai secara peorangan sehingga tujuan balai tercapai.

Untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran terdiri dari (1). Keperluan sehari – hari perkantoran (2) pembayaran langganan daya dan jasa, (3) Pemeliharaan Perkantoran (Gedung, Bangunan serta Peralatan dan Mesin), (4) Pembayaran terkait pelaksanaan operasional satuan kerja. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

- Capaian kegiatan di lapang :
1. operasional kegiatan perkantoran berjalan rutin sesuai kebutuhan setiap bulannya ( pembayaran honorarium tenaga UHL serta kebutuhan bulanan perkantoran lainnya
  2. kegiatan perkantoran berjalan rutin sesuai kebutuhan setiap bulannya ( Langganan daya dan jasa )
  3. Pemeliharaan halaman, gedung dan bangunan meliputi gedung AOR plafon dan atap bocor, perbaikan instalasi air di kandang, pemangkasan rumput di halaman, 2.
  4. Pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi operasional kendaraan roda empat dan roda tiga serta perbaikan ac di beberapa bagian gedung,
  5. Pemeliharaan jaringan yakni pemindahan jaringan cctv
  6. Pakan :
    - 1, Pemeliharaan ayam calon induk DOC dengan jumlah awal sebanyak Narayana; Gaosi dan Janaka
    2. Pelaksanaan vaksinasi
    3. Pemberian pakan, minum serta pergantian sekam
    4. Pengumpulan telur, seleksi, candling, penetasan dan panen
    5. Penjualan ayam

6. Mengikuti diseminasi Standar Instrumen SNI ayam KUB

7. Pelaksanaan surveilence penyakit Aik

Kendala : Pakan ayam grower tidak tersedia di distributor dikarenakan kendala pengiriman

Solusi : Untuk sementara pakikan diganti dengan pakan ayam pedaging

Realisasi fisik : 50 %

Realisasi keuangan : 43,21 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

Pada bulan Juli 2023, UPBS ayam KUB-Sensi melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi DOC. Pada bulan ini dilaksanakan 4 kali penetasan telur dengan rincian sebagai berikut :

1. 5 Juli 2023 565 butir telur
2. 12 Juli 2023 599 butir telur
3. 19 Juli 2023 570 butir telur
4. 26 Juli 2023 539 butir telur

Pada bulan Juli 2023 juga dilaksanakan 5 kali panen DOC sesuai dengan tabel terlampir.

Bulan	Tgl Panen	Produksi DOC				Jumlah Produksi DOC
		Sehat	Mati	Cacat	Telur (tdk menetas)	
Juli	4 Juli 2023	464	6	7	43	477
	11 Juli 2023	442	2	4	39	448
	18 Juli 2023	380	10	6	50	396
	25 Juli 2023	355	2	19	75	376

Dari keseluruhan hasil panen DOC tersebut maka telah dilakukan distribusi DOC selama kurun bulan Juli 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Bulan	Tgl Panen	Jumlah DOC Sehat	Data Distribusi			Total Terdistribusi	Tidak Terdistribusi	Ket.
			Penjualan	Bonus	Bantuan (BA)			
Juli	4 Juli 2023	464	460	4		464		
	11 Juli 2023	442	438	4		442		
	18 Juli 2023	380	377	3		380		
	25 Juli 2023	355	350	5		355		

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa keseluruhan produksi DOC telah terdistribusi pada bulan yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa produktivitas UPBS Kandang Ayam KUB-Sensi BPSIP Gorontalo cukup tinggi.

## **2.19 Peningkatan Kapasitas SDM dalam Rangka Pengelolaan Manajemen Kepegawaian**

### **Ringkasan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPSIP Gorontalo memiliki sumberdaya manusia sebanyak 42 pegawai ASN terdiri dari 4 fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), 4 fungsional Pengawas Bibit Tanaman (PBT), 1 orang Analis Standarisasi (ASTA), 1 orang Analis Kebijakan (ANJAK), 1 orang Pengawas Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), 8 orang fungsional penyuluh, 6 orang Pengawas Bibit Tanaman Terampil, 2 orang Calon Pranata Komputer dan 15 tenaga administrasi. Tenaga honorer dan tenaga harian lepas sejumlah 21 orang terdiri dari perugas kebersihan, administrasi dan pengemudi. Berdasarkan jenjang pendidikan, BPSIP Gorontalo memiliki 2 orang Doktor (S3), 7 Master (S2), dan 15 Sarjana (S1), 3 orang (D3), serta 15 berpendidikan SLTA ke bawah. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia yang tersedia, beberapa pegawai mengikuti pendidikan tugas belajar S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 2 orang dan DIV sebanyak 2 orang.

Untuk menciptakan sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap dan pengabdian, dan pengembangan PNS melalui pendidikan dan pelatihan maupun non pendidikan dan pelatihan.

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapangan	:	Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional di lingkup BPSIP Gorontalo terkait implementasi SNI di bidang pertanian, bekerja sama dengan BSN
Kendala	:	-
Solusi	:	-
Realisasi fisik	:	65 %
Realisasi keuangan	:	61 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## **2.20 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran**

### **Ringkasan**

Balai Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Gorontalo merupakan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Tanggal 21 September 2022. Disebutkan bahwa Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam upaya mencapai visi tersebut, penyelenggaraan manajemen perkantoran merupakan hal yang tidak kalah penting dilaksanakan guna mendukung output kinerja Balai. Selain daripada itu, tentunya perlu ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas dan kinerja Balai.

Penyusunan program kerja BSIP Gorontalo dalam mewujudkan tupoksi BSIP harus terarah sehingga dalam perjalanan tidak keluar dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Penyusunan program kerja berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) Kementerian Pertanian yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Program Kerja tahunan ditetapkan dengan mengacu pada: 1) Kebijakan pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian, 2) Renstra Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Renstra UK/UPT, 3) Kebutuhan pemangku kepentingan yang diperoleh melalui mekanisme penjangkauan umpan balik, serta 4) Kebutuhan mendesak dalam bidang pertanian atau kebutuhan yang bersifat antisipatif dan responsif terhadap isu-isu aktual dan strategis. Program kerja yang tersusun dengan baik akan memudahkan Balai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya guna tercapainya tujuan Balai.

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapangan : 1. Mengikuti zoom meeting sosialisasi juklak lingkup BSIP  
2. Pemenuhan data belanja operasional BSIP Gorontalo TA 2024  
3. Pemenuhan data realisasi dan target PNB  
4. Pemenuhan data kegiatan dan komoditas unggulan BSIP  
5. Penyusunan pagu indikatif BSIP TA 2024 dan data dukungannya

Kendala : Belum ditemui kendala pelaksanaan kegiatan

Solusi : Koordinasi antar unit pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan perencanaan dan anggaran kegiatan

Realisasi fisik : 60 %

Realisasi keuangan : 31,82 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Januari 2023

## **2.22 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

### **Ringkasan**

Balai Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Gorontalo merupakan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Tanggal 21 September 2022. Disebutkan bahwa Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam upaya mencapai visi tersebut, penyelenggaraan manajemen perkantoran merupakan hal yang tidak kalah penting dilaksanakan guna mendukung output kinerja Balai. Selain daripada itu, tentunya perlu ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas dan kinerja Balai.

Penyusunan program kerja BSIP Gorontalo dalam mewujudkan tupoksi BSIP harus terarah sehingga dalam perjalanan tidak keluar dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Penyusunan program kerja berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) Kementerian Pertanian yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Program Kerja tahunan ditetapkan dengan mengacu pada: 1) Kebijakan

pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian, 2) Renstra Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Renstra UK/UPT, 3) Kebutuhan pemangku kepentingan yang diperoleh melalui mekanisme penjangkaran umpan balik, serta 4) Kebutuhan mendesak dalam bidang pertanian atau kebutuhan yang bersifat antisipatif dan responsif terhadap isu-isu aktual dan strategis. Program kerja yang tersusun dengan baik akan memudahkan Balai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya guna tercapainya tujuan Balai.

Guna mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka diperlukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Sistem monitoring dan evaluasi merupakan salah satu alat manajemen yang penting dari suatu organisasi/ institusi. Monitoring atau pemantauan dilakukan untuk melihat efektivitas pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dengan tujuan sebagai bahan penyempurnaan atau umpan balik bagi pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya tujuan akhir kegiatan dapat tercapai. Sementara itu evaluasi dilakukan ketika pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan, dan memiliki tujuan menilai capaian kegiatan atau program.

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapangan	: -Pemenuhan laporan Perbenihan, Kegiatan bimtek dan Realisasi anggaran -Updating aplikasi monev seperti e-Monev Bappenas, SMART DJA, e-Sakip dan E monev BSIP -Mengikuti pelaksanaan zoom meeting pengisian Domestic Support -Pemenuhan data Reanaksi Lingkup BBPSIP -Pemenuhan data realisasi perbenihan -Pemenuhan data realisasi sarana pengujian, pendampingan penerapan terstandar, Realisasi bimtek non aspirasi, Realisasi indentifikasi standar instrumen, dan keg Diseminasi
Kendala	: Pelaporan capaian output pada aplikasi SAKTI belum terisi dikarenakan keterlambatan pengisian
Solusi	: Konsultasi dengan KPPN dan DJPb Gorontalo untuk dapat membukakan akses pengisian capaian output di aplikasi
Realisasi fisik	: 60 %
Realisasi keuangan	: 13,91 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## **2.23 Sistem Pengendalian Internal (SPI)**

### **Ringkasan**

Berdasarkan SK Peraturan Menteri Pertanian No. 08 Tahun 2022 mengenai penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian, disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI memiliki peranan dalam membantu pimpinan

bertugas melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi/penilaian, pengendalian (saran perbaikan dan atau rekomendasi), dan melaporkan semua temuannya kepada pimpinan. Dalam memaksimalkan peran pengendalian intern maka perlu dilakukan sistem pengendalian intern hingga pada penyusunan manajemen resiko indeks. Hasil dari penyusunan resiko yang telah diidentifikasi disiapkan tindakan pengendalian untuk mengurangi tingkat ancaman yang terjadi. Hal tersebut diharapkan akan berdampak pada penilaian maturitas di lingkup BPSIP Gorontalo.

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapangan	:	a. Masing masing penanggung jawab kegiatan telah melakukan pengisian form SPI. b. Form SPI (Penilaian resiko) dimasukkan dalam proposal kegiatan. c. Telah dilakukan pengisian penilaian resiko tengah tahun oleh masing masing penanggung jawab kegiatan
Kendala	:	Keterlambatan pengumpulan form SPI oleh penanggung jawab kegiatan
Solusi	:	Akan lebih intensif lagi proses pengumpulan form SPI oleh tim SPI
Realisasi fisik	:	40 %
Realisasi keuangan	:	14,22 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## **2.24 Evaluasi ZI / WBK dan WBBM**

### **Ringkasan**

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi bagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi perlu dibangun program pencegahan korupsi yang lebih efisien, efektif dan komprehensif, melalui penetapan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pertanian, khususnya di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPP) Gorontalo merupakan bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang konkrit, sebagai bagian dari pencapaian reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada instansi (unit-unit kerja) lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya Pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka pembangunan Zona integritas, langkah- langkah yang perlu dilakukan adalah menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrument evaluasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Sehingga perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Balai Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Gorontalo dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019.

### Hasil Monitoring Evaluasi

Capaian kegiatan di : - kegiatan pelaksanaan rutin dalam rangka mendukung lapang kegiatan WBK terkait dengan kedisiplinan pegawai melalui daftar absensi kehadiran apel, jam keluar di waktu jam kantor

- Kendala : -
- Solusi : -
- Realisasi fisik : 30 %
- Realisasi keuangan : 31,70 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

Pada bulan Juli 2023 dilakukan Survey Indeks Persepsi Korupsi di BPSIP Gorontalo, terdapat 8 responden yang mengisi kuisioner dan responden bersifat heterogen. Hasil analisis menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi di BPSIP Gorontalo memiliki nilai interval konversi IPK sebesar 83,75 atau sama dengan mutu pelayanan B yang berarti Bebas dari Korupsi. Terlampir hasil analisis Survey Indeks Persepsi Korupsi di BPSIP Gorontalo adalah sebagai berikut.

#### PENGOLAHAN DATA KUESIONER INDEKS PERSEPSI KORUPSI PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK  
ALAMAT  
TELP/FAK  
EMAIL

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO/UMUM  
Jalan Moh Van Gobel No.270, Ilohelums, Tilongkabila, Bone Bolango, Gorontalo  
(0430) 827627  
[www.gorontalo.itbang.pertanian.go.id](http://www.gorontalo.itbang.pertanian.go.id)

BULAN	RESPONDEN						JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	USIA	PENDIDIKAN	KEPERLUAN
	1	2	3	4	5	6					
JULI	1	4	4	4	4	4	L	PNS	30	S2	PENARIKAN MAHASISWA MAGANG
	2	3	3	3	3	3	P	PNS	39	S1	MONITORING SISWA PRAKERIN
	3	3	4	4	4	4	L	PNS	37	S1	MENGANTAR SISWA PKL
	4	4	4	4	4	4	L	PEGAWAI SWASTA	28	S1	VISIT LAB
	5	3	3	3	3	3	P	PNS	37	S1	MENGANTAR SISWA PKL
	6	3	3	4	4	4	L	PNS	42	S1	MENGANTAR SURAT
	7	3	3	3	3	3	L	PNS	45	S1	MENGANTAR SURAT DAN MONITORING ANAK ANAK PKL
	8	3	2	3	2	2	P	MAHASISWA	23	SMA	PENELITIAN
TOTAL		26	26	28	27	27					
NRR PER UNSUR= JLH NILAI PERUNSUR: JUMLAH		3.25	3.25	3.50	3.38	3.38					
NRR TERTIMBANG PERUNSUR =		0.65	0.65	0.70	0.68	0.68					
NRR PERUNSUR X 0.71 =		46.15	46.15	49.70	47.93	47.93					
NILAI INDEKS		3.35									
IKM UNIT PELAYANAN		83.75									
MUTU PELAYANAN		B									
KINERJA		BAIK									

#### KETERANGAN

U1-U9 = UNSUR-UNSUR PELAYANAN  
 NRR = NILAI RATA-RATA  
 IKM = INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
 .\*) = JUMLAH NRR TERTIMBANG  
 .\*) = JUMLAH NRR TERTIMBANGx25  
 NRR PERUNSUR = JUMLAH NRR  
 NRR TERTIMBANG = NRR PERUNSUR X 0.111 PERUNSUR

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	INTEGRITAS	3.25
U2	ANTI DISKRIMINATIF	3.25
U3	PROSEDUR	3.5
U4	BALAS JASA	3.25
U5	PUNGUTAN LIAR	3.25

## **2.25 Layanan Manajemen Keuangan**

### **Ringkasan**

Pengelolaan laporan keuangan merupakan suatu hal yang fundamental dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran. Oleh karena itu dalam sebuah manajemen perkantoran mutlak dibutuhkan penyusunan laporan keuangan yang baik dalam rangka menstimulasi kegiatan-kegiatan operasional perkantoran. Perubahan pengelolaan keuangan negara dimulai dengan diundangkannya undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiscal dan wakil pemerintah dalam kepemilikankekayaan negara yang dipisahkan, dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya.

Sesuai UU No. 17 Tahun 2003 pasal 30 ayat 2 dan UU No. 1 Tahun 2004 pasal 55, Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selanjutnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa bentuk dan isi Laporan Keuangan disajikan sesuai estandar Akuntansi Pemerintah yang disusun oleh statu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PeraturanPemerintah. UU No. 1 Tahun 2004 selanjutnya menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara. Menindaklanjuti aturan tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menkeu No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat dan telah disempurnakan lagi dengan Peraturan Menkeu No. 171/PMK.05/2007 yang berlaku bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola APBN.

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapang	:	-
Kendala	:	-
Solusi	:	-
Realisasi fisik	:	50 %
Realisasi keuangan	:	19,29 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

## **2.26 Dukungan Operasional Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA/B-W**

### **Ringkasan**

Sesuai UU No. 17 Tahun 2003 pasal 30 ayat 2 dan UU No. 1 Tahun 2004 pasal 55, Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selanjutnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa bentuk dan isi Laporan Keuangan disajikan sesuai estandar Akuntansi Pemerintah yang disusun oleh statu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PeraturanPemerintah. UU No. 1 Tahun 2004 selanjutnya menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang menetapkan Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Negara. Menindaklanjuti aturan tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menkeu No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat dan telah disempurnakan lagi dengan Peraturan Menkeu No. 171/PMK.05/2007 yang berlaku bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola APBN.

Sesuai Permenkeu tersebut, laporan keuangan disusun secara berjenjang oleh seluruh tingkatan instansi, dari tingkat Satker (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang / UAKPA/B), ketinggian Wilayah (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah/ UAPPA/B W), ketinggian Eselon I (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I) sampai ketinggian Kementerian/Lembaga (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang).

Berdasarkan pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 tahun 2007 Melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/ 09/2008 Departemen Pertanian telah menunjuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPSIP) Badan Litbang Pertanian sebagai Sekretariat UAPPA/B-W internal Departemen Pertanian. Secara operasional kepala BPSIP ditunjuk sebagai kepala sekretariat, sedangkan operator dan verifikator adalah petugas pembuat laporan dari satker Dekon/TP sektor pertanian yang ditunjuk oleh pimpinan daerah.

### **Hasil Monitoring Evaluasi**

Capaian kegiatan di lapang : - Workshop Verifikasi dan Reviu Laporan Keuangan/BMN Semester I TA.2023 UAPPA/B E-1

- membuat rincian belanja barang per Akun detail/30 Juni 2023, jumlah dan komposisi pegawai, rekapitulasi bukti setor pendapatan

- membuat laporan kertas kerja telaah Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pemngguna Anggaran Eselon I ( UAPPA - E1) Semester I Tahun 2023

Kendala : - terdapat alokasi velanja modal senilai Rp. 80.000.000 berupa peralatan dan mesin yang belum terealisasi .

- terdapat perbedaan saldo pendapatan antara LO dengan LRA senilai Rp. 587.464

- terdapat aset tetap yang belum diusulkan status penggunaannya ( PSP) senilai Rp. 105.274.060 berupa peralatan dan mesin

- terdapat aset tetap yang telah dihentiguna berupa gedungdan bangunan dengan kondisi rusak berat senilai Rp. 83.553.000 dan di usulkan penghapusan sesuai surat usulan no. B-809/PL.320/h.10.29/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022

- Terdapat aset Ekstrakompatabel berupa ternak sapi sebnyak 8 ekor senilai Rp. 14.000.000

Solusi : -

Realisasi fisik : 75 %

Realisasi keuangan : 76,33 %

Sumber data : Monev PE BPSIP Gorontalo Juli 2023

### **III. PENUTUP**

Dengan penyelesaian laporan tengah tahun ini, kami ingin mengekspresikan rasa terima kasih kami kepada seluruh tim, teman-teman penanggung jawab kegiatan dan pemangku kepentingan yang telah berperan aktif dan berkontribusi dalam pencapaian dan kemajuan kegiatan yang telah dibahas dalam laporan ini.

Laporan tengah tahun ini mencerminkan komitmen dan dedikasi Bersama dalam menjalankan visi dan misi BSIP Gorontalo. Ini juga mencerminkan semangat kolaborasi dan semangat untuk terus berinovasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang muncul.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat yang terus mendukung dan mempercayai kami dalam upaya kami menciptakan dampak positif. Kami akan terus mendengarkan mendengarkan umpan balik anda dan berusaha menjadi mitra yang lebih baik.

Dalam bab penutup ini, kami menegaskan tekad kami untuk terus bekerja keras dan mencapai standar mutu pertanian yang lebih tinggi di masa depan.